

**PENGARUH PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI KEUANGAN
DAERAH DAN PERAN INTERNAL AUDIT TERHADAP
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(Studi Pada Pegawai Perumahan dan Permukiman (Perkim) Aceh)**

Arif Ikbal¹, Budi Safatul Anam², Zulkifli Umar³.

¹Universitas Muhammadiyah Aceh

²Universitas Muhammadiyah Aceh

³Universitas Muhammadiyah Aceh

*Korespodensi: ikbal_arif77@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of the utilization of regional financial accounting information systems and the role of internal audit on the quality of local government financial statements. A quantitative research approach was employed, with the study conducted at the Housing and Settlement Office (Perumahan dan Permukiman/Perkim) of Aceh Province. Primary data were collected through a structured questionnaire distributed to 25 employees directly involved in regional financial management. The data were analyzed using multiple linear regression with the assistance of Statistical Package for Social Science (SPSS).

The results indicate that the utilization of regional financial accounting information systems and the role of internal audit simultaneously have a significant effect on the quality of local government financial statements. Furthermore, partial testing reveals that each independent variable has a positive and significant influence on financial reporting quality. These findings suggest that the effective use of integrated financial accounting information systems, supported by adequate information technology infrastructure, along with a strong and independent internal audit function, plays a crucial role in enhancing the relevance, reliability, comparability, and understandability of local government financial statements.

This study provides practical implications for local governments to strengthen the implementation of regional financial accounting information systems and reinforce the internal audit function to improve transparency and accountability in public financial management. In addition, the findings contribute to the existing literature and may serve as a reference for future studies by expanding research objects and variables.

Keywords: *regional financial accounting information system, internal audit, financial statement quality, local government.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan peran internal audit terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini dilakukan pada Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Provinsi Aceh dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Data primer dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada 25 pegawai yang

terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan daerah. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan bantuan perangkat lunak Statistical Package for Social Science (SPSS).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan peran internal audit secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu, pengujian secara parsial juga membuktikan bahwa masing-masing variabel independen memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Temuan ini mengindikasikan bahwa optimalisasi penggunaan sistem informasi akuntansi keuangan daerah yang didukung oleh teknologi informasi yang memadai, serta efektivitas peran internal audit dalam menjalankan fungsi pengawasan dan evaluasi, berkontribusi secara nyata dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami.

Penelitian ini memberikan implikasi praktis bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan memperkuat peran internal audit guna mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dengan memperluas objek dan variabel penelitian.

Kata kunci: sistem informasi akuntansi keuangan daerah, internal audit, kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

1. PENDAHULUAN

Laporan keuangan pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam pengelolaan keuangan publik karena berfungsi sebagai sarana pertanggungjawaban sekaligus sumber informasi utama bagi pengambilan keputusan dalam perencanaan, penganggaran, dan pengendalian keuangan daerah. Penyusunan laporan keuangan yang berkualitas menjadi tuntutan utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menegaskan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus disusun secara andal, relevan, dan dapat dipahami guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan publik. Kementerian Dalam Negeri (2021) juga menunjukkan bahwa peningkatan kualitas laporan keuangan berkorelasi positif dengan meningkatnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan, pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah (SIAKD) menjadi faktor yang sangat krusial. SIAKD berperan dalam proses pengumpulan, pengolahan, dan penyajian informasi keuangan secara sistematis dan terintegrasi. Penerapan sistem informasi akuntansi yang efektif tidak hanya meningkatkan akurasi pencatatan transaksi,

tetapi juga mempercepat penyajian laporan keuangan secara tepat waktu. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penggunaan sistem informasi akuntansi yang terintegrasi mampu menekan tingkat kesalahan pencatatan transaksi keuangan secara signifikan, sehingga berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Susanto & Rahardjo, 2020; Syamsidar et. al, 2024). Dengan demikian, SIAKD tidak lagi sekadar berfungsi sebagai alat administratif, melainkan sebagai instrumen strategis dalam mendukung akuntabilitas keuangan publik.

Selain sistem informasi akuntansi, peran internal audit juga menjadi elemen penting dalam menjamin kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Internal audit berfungsi sebagai mekanisme pengawasan internal yang memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan dan pelaporan keuangan telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keberadaan internal audit yang efektif dapat membantu mendeteksi kesalahan, ketidaksesuaian, maupun potensi kecurangan sejak dini, serta memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem akuntansi. Mardiasmo (2018) menyatakan bahwa fungsi internal audit yang berjalan optimal memiliki kontribusi signifikan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah melalui penguatan sistem pengendalian internal.

Meskipun pemanfaatan SIAKD dan peran internal audit secara konseptual diyakini berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, implementasi keduanya di lingkungan pemerintah daerah masih menghadapi berbagai tantangan. Perbedaan tingkat pemahaman sumber daya manusia, keterbatasan infrastruktur teknologi, serta efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan internal berpotensi menyebabkan variasi kualitas laporan keuangan antarinstansi pemerintah daerah. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji tidak hanya pengaruh masing-masing faktor secara parsial, tetapi juga hubungan dan interaksi antara pemanfaatan SIAKD dan peran internal audit dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Penelitian ini difokuskan pada pegawai Dinas Perumahan dan Permukiman Aceh, sebagai salah satu organisasi perangkat daerah yang memiliki tanggung jawab besar dalam pengelolaan anggaran dan pelaporan keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan peran internal audit terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, serta menilai hubungan sinergis antara kedua faktor tersebut. Dengan pendekatan kuantitatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai faktor-faktor penentu kualitas laporan keuangan di lingkungan pemerintah daerah.

Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur di bidang akuntansi sektor publik dan audit pemerintahan, khususnya terkait peran teknologi informasi dan fungsi pengawasan internal. Dari sisi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah

daerah dalam merumuskan kebijakan dan strategi peningkatan kualitas sistem akuntansi dan fungsi internal audit. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

2. TINJAUAN TEORITIS

Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan instrumen utama akuntabilitas publik yang mencerminkan pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya ekonomi oleh pemerintah kepada para pemangku kepentingan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan didefinisikan sebagai laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Dalam konteks sektor publik, laporan keuangan tidak hanya berfungsi sebagai sarana informasi keuangan, tetapi juga sebagai representasi kinerja pemerintah daerah dalam menjalankan amanah pengelolaan keuangan secara transparan dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah daerah harus disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku agar dapat dibandingkan secara antarperiode maupun antarentitas serta memiliki tingkat keandalan yang tinggi.

A. Konsep Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah

Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah (SIAKD) merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mengelola dan memproses informasi keuangan dalam konteks pemerintahan daerah. Definisi SIAKD dapat dipahami sebagai alat yang membantu dalam pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data keuangan yang relevan dan akurat untuk mendukung pengambilan keputusan. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, SIAKD memiliki fungsi utama dalam menghasilkan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel (PP No. 71, 2010).

Komponen utama dari SIAKD meliputi perangkat keras, perangkat lunak, prosedur, dan sumber daya manusia yang terlibat dalam proses akuntansi. Perangkat keras mencakup komputer dan jaringan yang digunakan untuk menyimpan dan memproses data. Perangkat lunak adalah aplikasi yang digunakan untuk melakukan pengolahan data akuntansi, sedangkan prosedur mencakup langkah-langkah yang diambil dalam pengumpulan dan pelaporan data. Sumber daya manusia memainkan peran penting dalam mengoperasikan sistem ini, di mana keterampilan dan pengetahuan mereka akan mempengaruhi efektivitas SIAKD (Mardiasmo, 2018).

Pemanfaatan SIAKD dalam pemerintahan daerah sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan. Dengan adanya SIAKD, proses pengumpulan dan pelaporan data keuangan dapat dilakukan

secara otomatis, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan manual. Selain itu, SIAKD juga memungkinkan pemerintah daerah untuk melakukan analisis keuangan yang lebih mendalam, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi keuangan daerah. Sebagai contoh, Dinas Perumahan dan Permukiman Aceh telah menerapkan SIAKD yang memungkinkan mereka untuk melacak pengeluaran dan pendapatan secara real-time, sehingga memudahkan dalam pengambilan keputusan (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2022).

Statistik menunjukkan bahwa daerah yang memanfaatkan SIAKD dengan baik cenderung memiliki laporan keuangan yang lebih berkualitas. Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021, 75% dari pemerintah daerah yang menerapkan SIAKD secara efektif mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Ini menunjukkan bahwa pemanfaatan SIAKD berkontribusi signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa SIAKD tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menghasilkan laporan keuangan, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang lebih baik dalam pengelolaan keuangan daerah. Peningkatan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan dari SIAKD dapat memberikan dampak positif bagi transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah (Mardiasmo, 2018).

B. Peran Internal Audit

Internal audit memiliki peran yang sangat krusial dalam memastikan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah, termasuk Dinas Perumahan dan Permukiman, adalah akurat dan dapat diandalkan. Definisi internal audit menurut Institute of Internal Auditors (IIA) adalah suatu kegiatan yang independen dan objektif yang memberikan nilai tambah dan perbaikan pada organisasi melalui pendekatan sistematis dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses pemerintahan (IIA, 2020).

Tugas utama internal audit mencakup penilaian terhadap sistem pengendalian internal, evaluasi kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, serta penilaian terhadap efisiensi dan efektivitas operasional. Dalam konteks laporan keuangan, internal audit berfungsi untuk memastikan bahwa semua transaksi keuangan dicatat dengan benar dan bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Hal ini sangat penting untuk menghindari kesalahan atau penyimpangan yang dapat merugikan keuangan daerah (KAP, 2021; Mauliansyah; 2025).

Hubungan antara internal audit dan kualitas laporan keuangan sangat erat. Internal audit yang efektif dapat membantu mengidentifikasi dan mengatasi kelemahan dalam sistem akuntansi dan pelaporan keuangan. Dengan melakukan audit secara berkala, internal audit dapat memberikan rekomendasi perbaikan

yang dapat meningkatkan akurasi dan transparansi laporan keuangan. Sebuah studi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menunjukkan bahwa daerah yang memiliki fungsi internal audit yang kuat cenderung memiliki laporan keuangan yang lebih berkualitas dan mendapatkan opini WTP dari BPK (BPKP, 2021).

Praktik internal audit di Dinas Perumahan dan Permukiman Aceh telah menunjukkan adanya peningkatan dalam kualitas laporan keuangan. Internal audit di Dinas ini secara rutin melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan dan memberikan masukan kepada manajemen untuk perbaikan. Sebagai contoh, pada tahun 2022, hasil audit internal menunjukkan adanya beberapa kelemahan dalam pencatatan aset tetap, yang kemudian diperbaiki dan menghasilkan laporan keuangan yang lebih akurat (Dinas Perumahan dan Permukiman Aceh, 2022).

Dengan demikian, peran internal audit dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan tidak dapat dipandang sebelah mata. Internal audit yang efektif tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam pengelolaan keuangan daerah, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah.

C. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan keuangan publik. Kriteria kualitas laporan keuangan meliputi relevansi, keandalan, keterbandingan, dan keterpahaman. Relevansi mengacu pada sejauh mana informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat membantu pengguna dalam pengambilan keputusan. Keandalan berkaitan dengan akurasi dan konsistensi informasi yang disajikan, sedangkan keterbandingan memungkinkan pengguna untuk membandingkan laporan keuangan dari periode yang berbeda atau antara entitas yang berbeda (Suhardjo, 2020).

Pentingnya kualitas laporan keuangan untuk pengambilan keputusan tidak dapat diabaikan. Laporan keuangan yang berkualitas tinggi memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai kondisi keuangan suatu daerah, yang pada gilirannya membantu pengambil keputusan dalam merencanakan dan mengelola anggaran dengan lebih efektif. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh World Bank menunjukkan bahwa daerah dengan laporan keuangan yang berkualitas tinggi cenderung memiliki kinerja fiskal yang lebih baik dan mampu menarik investasi lebih banyak (World Bank, 2021).

Dalam konteks Dinas Perumahan dan Permukiman Aceh, kualitas laporan keuangan sangat penting untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur perumahan dan permukiman digunakan secara efisien. Laporan keuangan yang akurat akan membantu manajemen dalam mengevaluasi kinerja proyek dan melakukan perencanaan yang lebih baik untuk

proyek-proyek di masa depan. Sebagai contoh, dalam proyek pembangunan perumahan, laporan keuangan yang baik memungkinkan manajemen untuk melacak pengeluaran dan memastikan bahwa proyek tetap dalam anggaran yang ditetapkan (Dinas Perumahan dan Permukiman Aceh, 2022).

Statistik menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kualitas laporan keuangan dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Menurut survei yang dilakukan oleh BPS pada tahun 2021, daerah yang memiliki laporan keuangan dengan opini WTP dari BPK menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat yang lebih tinggi terhadap pelayanan publik dibandingkan dengan daerah yang tidak mendapatkan opini WTP (BPS, 2021).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sangat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan dan kepuasan masyarakat. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan harus menjadi prioritas bagi setiap pemerintah daerah, termasuk Dinas Perumahan dan Permukiman Aceh.

Berdasarkan kajian teoritis dan temuan empiris tersebut, dapat disimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sangat dipengaruhi oleh efektivitas pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan peran audit internal. Sistem informasi akuntansi yang andal akan menghasilkan informasi keuangan yang relevan dan dapat dipercaya, sementara audit internal yang efektif akan memastikan keandalan dan kepatuhan dalam proses pelaporan keuangan. Oleh karena itu, penelitian ini menguji pengaruh pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan peran audit internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Pegawai Perumahan dan Permukiman Aceh, dengan hipotesis bahwa kedua variabel tersebut baik secara simultan maupun parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dirancang menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian yang bersifat kausalitas, yaitu untuk menguji hubungan sebab-akibat antara variabel independen dan variabel dependen. Desain penelitian dipilih untuk memastikan proses penelitian berlangsung secara sistematis, objektif, efisien, dan valid dalam menjawab tujuan penelitian. Fokus utama penelitian ini adalah menguji pengaruh pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan peran internal audit terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Provinsi Aceh.

Tujuan penelitian ini bersifat pengujian hipotesis, yakni menjelaskan fenomena empiris dalam bentuk pengaruh antarvariabel. Penelitian ini menempatkan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan peran internal audit

sebagai variabel independen, sementara kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebagai variabel dependen. Hubungan antarvariabel dianalisis untuk memperoleh bukti empiris mengenai peran sistem informasi dan fungsi audit internal dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan sektor publik.

Jenis investigasi yang digunakan adalah penelitian kausal, karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Pengumpulan data dilakukan dengan horizon waktu one-shot, yaitu pengambilan data yang dilakukan satu kali pada periode tertentu tanpa pengamatan berulang, sehingga mencerminkan kondisi aktual responden pada saat penelitian dilaksanakan.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah individu, yaitu pegawai pada Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Provinsi Aceh. Data dikumpulkan dengan menyebarkan kuesioner secara langsung kepada responden yang terlibat dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan. Populasi penelitian mencakup seluruh pegawai Dinas Perkim Provinsi Aceh, namun sampel penelitian difokuskan pada pegawai yang memiliki keterkaitan langsung dengan fungsi keuangan. Jumlah responden yang dijadikan sampel adalah 25 orang, yang terdiri dari bendahara umum, bendahara pengeluaran, bendahara pemasukan, verifikator, sekretaris, petugas pajak, pengelola SP2D, staf e-billing pelaporan, dan staf administrasi keuangan. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara purposive, dengan pertimbangan bahwa responden memiliki kompetensi dan peran yang relevan dengan variabel penelitian.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner terstruktur. Kuesioner disusun dalam bentuk pertanyaan tertutup dengan pilihan jawaban yang telah ditentukan, sehingga memudahkan responden dalam memberikan jawaban dan memudahkan peneliti dalam proses pengolahan data. Seluruh item pertanyaan diukur menggunakan skala interval dengan lima tingkat penilaian, mulai dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Skala ini digunakan untuk mengukur intensitas persepsi responden terhadap setiap indikator variabel penelitian.

Operasionalisasi variabel dilakukan dengan merumuskan definisi konseptual dan indikator pengukuran yang jelas untuk menghindari perbedaan interpretasi. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah diukur berdasarkan karakteristik relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah diukur melalui indikator ketersediaan dan penggunaan perangkat komputer, pemanfaatan jaringan internet, proses akuntansi terkomputerisasi, penggunaan perangkat lunak sesuai regulasi, integrasi laporan akuntansi dan manajerial, serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan. Sementara itu, peran internal audit diukur melalui indikator perencanaan pemeriksaan, pengujian dan evaluasi informasi, penyampaian hasil pemeriksaan, serta tindak lanjut hasil pemeriksaan. Seluruh indikator diukur menggunakan skala interval untuk memastikan konsistensi dan ketepatan pengukuran.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Metode ini dipilih untuk mengetahui pengaruh simultan maupun parsial dari variabel independen terhadap variabel dependen. Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai:

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

di mana Y merupakan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, α adalah konstanta, b_1 dan b_2 adalah koefisien regresi, X_1 adalah pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah, X_2 adalah peran internal audit, dan e adalah error term.

Sebelum dilakukan analisis regresi, data penelitian terlebih dahulu diuji kualitasnya melalui uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas dilakukan untuk memastikan bahwa setiap item pertanyaan mampu mengukur variabel yang dimaksud. Pengujian validitas dilakukan menggunakan korelasi Pearson Product Moment dengan bantuan perangkat lunak SPSS versi 23. Suatu item dinyatakan valid apabila nilai koefisien korelasi lebih besar dari nilai r -tabel pada tingkat signifikansi 5%. Selanjutnya, uji reliabilitas dilakukan untuk menguji konsistensi instrumen penelitian menggunakan metode Cronbach Alpha. Instrumen dinyatakan reliabel apabila nilai koefisien alpha lebih besar dari 0,60, yang menunjukkan bahwa kuesioner memiliki tingkat konsistensi internal yang memadai.

Pengujian hipotesis dilakukan setelah seluruh asumsi pengujian terpenuhi. Pengujian hipotesis simultan dilakukan untuk mengetahui apakah pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan peran internal audit secara bersama-sama berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu, pengujian hipotesis parsial dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara terpisah terhadap variabel dependen. Keputusan penerimaan atau penolakan hipotesis ditentukan berdasarkan nilai signifikansi koefisien regresi pada tingkat kepercayaan 95%

4. HASIL PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Aceh, sebuah perangkat daerah yang sebelumnya dikenal sebagai Dinas Cipta Karya dan berlokasi di Kota Banda Aceh. Instansi ini memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah melalui penyediaan infrastruktur dan pelayanan dasar permukiman yang layak, produktif, dan berkelanjutan. Dengan jumlah pegawai sebanyak 345 orang yang terdiri dari pegawai negeri sipil dan tenaga kontrak, Dinas Perkim menjalankan fungsi pengelolaan keuangan daerah yang menuntut akuntabilitas dan kualitas pelaporan keuangan yang tinggi. Penelitian ini secara khusus melibatkan pegawai bagian

keuangan sebagai responden, mengingat peran mereka yang langsung berkaitan dengan penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.

Data primer dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada 25 responden dan seluruh kuesioner berhasil dikembalikan, sehingga tingkat respons mencapai 100%. Karakteristik responden menunjukkan komposisi yang relatif seimbang berdasarkan jenis kelamin, dengan mayoritas responden berusia di atas 36 tahun dan memiliki latar belakang pendidikan sarjana. Sebagian besar responden juga memiliki masa kerja antara lima hingga sepuluh tahun, yang mengindikasikan pengalaman kerja yang memadai dalam pengelolaan keuangan daerah. Kondisi ini memberikan dasar yang cukup kuat untuk menilai persepsi responden terhadap pemanfaatan sistem informasi akuntansi, peran internal audit, serta kualitas laporan keuangan pemerintah.

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah berada pada kategori tinggi, dengan nilai rata-rata sebesar 4,383. Responden menilai bahwa instansi telah didukung oleh perangkat komputer dan jaringan internet yang memadai, proses akuntansi yang terkomputerisasi, penggunaan perangkat lunak yang sesuai dengan regulasi, serta penyajian laporan keuangan dan manajerial yang terintegrasi. Temuan ini mengindikasikan bahwa penerapan sistem informasi akuntansi di lingkungan Dinas Perkim telah berjalan secara efektif dalam mendukung aktivitas pengelolaan keuangan. Sejalan dengan itu, variabel peran internal audit juga menunjukkan nilai rata-rata yang tinggi sebesar 4,490, yang mencerminkan bahwa fungsi audit internal telah dijalankan secara sistematis melalui perencanaan pemeriksaan, pengumpulan dan analisis bukti audit, pelaporan hasil pemeriksaan secara objektif, serta tindak lanjut atas temuan audit. Sementara itu, kualitas laporan keuangan pemerintah memperoleh nilai rata-rata sebesar 4,30, yang menunjukkan bahwa laporan keuangan dinilai relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami oleh pengguna.

Pengujian kualitas instrumen penelitian menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan dinyatakan valid dengan nilai koefisien korelasi lebih besar dari nilai kritis sebesar 0,413. Selain itu, hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai Cronbach's alpha di atas 0,6, sehingga instrumen penelitian dinyatakan reliabel dan konsisten dalam mengukur konstruk yang diteliti. Temuan ini menegaskan bahwa data yang digunakan dalam analisis selanjutnya memiliki tingkat keandalan yang memadai.

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan peran internal audit terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kedua variabel independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Persamaan regresi yang dihasilkan menunjukkan bahwa peningkatan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan penguatan peran internal audit secara simultan mampu meningkatkan kualitas

laporan keuangan pemerintah daerah. Nilai koefisien determinasi sebesar 0,855 mengindikasikan bahwa 85,5% variasi kualitas laporan keuangan dapat dijelaskan oleh kedua variabel tersebut, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Nilai koefisien korelasi sebesar 0,925 juga menunjukkan hubungan yang sangat kuat antara variabel independen dan variabel dependen.

Secara parsial, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah terbukti berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sistem informasi yang efektif dapat meningkatkan akurasi, ketepatan waktu, dan keandalan laporan keuangan pemerintah, sehingga prinsip-prinsip akuntansi dapat diterapkan secara lebih konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan. Hasil ini sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan sistem informasi akuntansi berperan penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu, peran internal audit juga terbukti berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Keberadaan fungsi audit internal yang efektif mampu memperkuat sistem pengendalian internal, meminimalkan risiko kesalahan dan kecurangan, serta meningkatkan kepercayaan terhadap informasi keuangan yang dihasilkan. Dengan demikian, internal audit berfungsi sebagai mekanisme pengawasan yang strategis dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah tidak dapat dilepaskan dari efektivitas pemanfaatan sistem informasi akuntansi dan optimalisasi peran internal audit. Temuan ini memberikan implikasi praktis bagi pemerintah daerah untuk terus berinvestasi dalam pengembangan sistem informasi akuntansi berbasis teknologi serta memperkuat fungsi audit internal sebagai bagian integral dari tata kelola keuangan yang baik.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian serta keterbatasan yang dimiliki dalam penelitian ini, maka beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

Pertama, Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Aceh diharapkan dapat terus mempertahankan dan meningkatkan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah serta mengoptimalkan peran internal audit dalam proses pengelolaan dan pelaporan keuangan. Upaya ini penting untuk memastikan bahwa sistem yang telah berjalan dapat terus mendukung penyajian laporan keuangan yang berkualitas.

Kedua, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan peran internal audit perlu dijaga konsistensinya, baik dari sisi kebijakan, sumber daya

manusia, maupun dukungan teknologi, karena terbukti berpengaruh terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Ramadani; 2025). Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, kualitas laporan keuangan dapat terus ditingkatkan seiring dengan tuntutan akuntabilitas publik yang semakin tinggi (Qhadafie; 2025).

Ketiga, bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas objek penelitian dengan melibatkan lebih dari satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Perluasan objek penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah serta meningkatkan generalisasi hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2022). Laporan Kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Aceh.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2022). Laporan Tahunan.

Badan Pusat Statistik. (2021). Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik.

Halim, A., & Abdullah, S. (2021). *Akuntansi keuangan daerah*. Jakarta: Salemba Empat.

Institute of Internal Auditors. (2019). Definition of Internal Auditing.

International Accounting Standards Board. (2014). IAS 11 construction contracts. London: IFRS Foundation.

International Accounting Standards Board. (2018). IFRS 15 revenue from contracts with customers. London: IFRS Foundation.

KAP. (2021). Panduan Praktik Internal Audit di Sektor Publik.

Ikatan Akuntan Indonesia. (2017). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 34: Kontrak konstruksi. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.

Kementerian Dalam Negeri. (2021). *Laporan evaluasi kinerja pengelolaan keuangan daerah*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Kementerian Dalam Negeri. (2021). Laporan Kinerja Pemerintahan Daerah.

Kementerian Keuangan. (2022). Statistik Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Lembaga Survei Indonesia. (2022). Survei Kepercayaan Publik terhadap Pemerintah Daerah.

Mauliansyah, H. (2025). ASSESSING THE SUSTAINABILITY OF SPECIAL AUTONOMY FUNDS IN ACHIEVING DEVELOPMENT GOALS: THE CASE OF ACEH. *Sumber Informasi Manajemen Bisnis dan Akuntansi (SIMBAN)*, 2(2), 1-10.

Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.

Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Andi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

PP No. 71. (2010). Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Prabowo, A., & Fitriani, R. (2020). Pengaruh Internal Audit terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 12(1), 45-60.

Qadhafie, J. M. (2025). THE INFLUENCE OF CORPORATE GOVERNANCE ON THE QUALITY OF FINANCIAL REPORTING. *Global Research in Economics and Advanced Theory (GREAT)*, 2(3), 84-92.

Ramadani, A. O. (2025). THE IMPACT OF EMPLOYEE TRAINING ON AUDITOR'S PERCEPTION OF AUDIT RISK. *Global Research in Economics and Advanced Theory (GREAT)*, 2(3), 93-99.

Sihombing, R. (2020). *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.

Suhardjo. (2020). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.

Susanto, A., & Rahardjo, B. (2020). Pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi Publik*, 12(2), 85-98.

Syamsidar, S., Sari, D. P., Mauliansyah, H., & Maisura, N. (2024). PENGARUH SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DAN AKTIVITAS PENGENDALIAN TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PROVINSI ACEH. *Jurnal Akuntansi Muhammadiyah (JAM)*, 1(1), 19-38.

Umar, Z., Mauliansyah, H., Taruna, D. A., Riski, F., & Gusfinur, L. (2023, February). The Effect Of Transparency And Accountability On Village Financial Management In Simeulue Tengah District, Simeulue Regency. In *Proceeding Medan International Conference on Economic and Business* (Vol. 1, pp. 1759-1766).

Wansyah, H., Darwanis, dan Bakar, U. (2012). *Pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan kegiatan pengendalian terhadap nilai informasi pelaporan keuangan SKPD pada Provinsi Aceh*. *Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*. Vol. 1. No. 1. Hal. 43-58

World Bank. (2021). *Public Financial Management in Indonesia: A Review of the Current Situation*.